

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

Konsep ketahanan pangan secara umum merujuk pada kondisi di mana semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup aktif dan preferensi makanan mereka. Dalam literatur terbaru, misalnya di Indonesia, studi menunjukkan bahwa aspek akses dan keragaman pangan sangat berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga pedesaan.

Rusmawati & Hartono (2021) menemukan bahwa modal sosial (*social capital*) berupa bonding dan bridging secara signifikan berhubungan dengan ketahanan pangan rumah tangga pedesaan di Indonesia. Dengan demikian, dalam penelitian ini, konsep ketahanan pangan menjadi fondasi utama karena program ketahanan pangan yang di-dana melalui alokasi 20% Dana Desa berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan akses dan stabilitas pangan bagi petani atau masyarakat desa.

Konsep ketahanan pangan terdiri atas beberapa dimensi utama yang saling berkaitan dan menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana suatu masyarakat atau rumah tangga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2021), terdapat empat dimensi utama ketahanan pangan, yaitu **ketersediaan pangan (*availability*)**, **akses pangan (*accessibility*)**, **pemanfaatan pangan (*utilization*)**, dan **stabilitas**

pangan (*stability*). Keempat dimensi ini sering dijadikan acuan dalam berbagai penelitian dan kebijakan ketahanan pangan, termasuk di tingkat desa.

Pertama, ketersediaan pangan (*availability*) berkaitan dengan jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah, baik yang berasal dari produksi lokal, perdagangan antarwilayah, maupun cadangan pangan. Dalam konteks pedesaan, ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh produktivitas pertanian, sistem distribusi, dan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan akses jalan (FAO, 2021). Program ketahanan pangan yang didanai oleh alokasi Dana Desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan melalui dukungan terhadap peningkatan produksi jagung, pembangunan sarana produksi, serta penyediaan benih dan pupuk.

Kedua, akses pangan (*accessibility*) mengacu pada kemampuan rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan yang cukup, baik secara fisik maupun ekonomi. Akses pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh daya beli, harga komoditas, serta mekanisme distribusi. Menurut Rusmawati dan Hartono (2021), peningkatan akses pangan di pedesaan sangat bergantung pada modal sosial, seperti jaringan antarpetani dan hubungan dengan lembaga pemerintah desa. Dalam hal ini, alokasi Dana Desa dapat membuka akses ekonomi bagi petani melalui bantuan sarana produksi dan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Ketiga, pemanfaatan pangan (*utilization*) berhubungan dengan bagaimana pangan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Pemanfaatan pangan tidak hanya menyangkut

jumlah pangan yang dikonsumsi, tetapi juga kualitas gizi, pengetahuan masyarakat tentang pola makan sehat, serta faktor sanitasi lingkungan. Program ketahanan pangan di tingkat desa berpotensi memperbaiki aspek pemanfaatan ini melalui kegiatan edukasi gizi, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan diversifikasi pangan lokal.

Keempat, stabilitas pangan (*stability*) menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan akses dan ketersediaan pangan dari waktu ke waktu, agar tidak mudah terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, atau bencana alam. Stabilitas ini penting untuk menjamin bahwa masyarakat tidak hanya memiliki pangan yang cukup pada waktu tertentu, tetapi juga secara berkelanjutan. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik, stabilitas pangan dapat dicapai melalui kegiatan yang memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani, diversifikasi usaha pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain empat dimensi utama tersebut, **keragaman pangan (*dietary diversity*)** juga dianggap sebagai indikator penting dari ketahanan pangan, karena mencerminkan kemampuan rumah tangga untuk mengakses berbagai jenis makanan bergizi. Menurut Herforth et al. (2022), keragaman pangan berhubungan erat dengan status gizi dan kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, intervensi melalui program ketahanan pangan desa yang memfasilitasi peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal beragam dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan keluarganya.

Secara keseluruhan, teori ketahanan pangan ini berguna untuk memahami bagaimana intervensi kebijakan, seperti alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, dapat memengaruhi **kesejahteraan petani jagung** baik secara langsung melalui peningkatan produksi dan pendapatan, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan akses, stabilitas, dan keragaman pangan di tingkat rumah tangga dan desa.

1. Teori Akses (*Theory of Access*)

Teori Akses (*Theory of Access*) pertama kali diperkenalkan oleh **Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003)** dalam artikelnya berjudul “*A Theory of Access*” yang diterbitkan di *Rural Sociology*. Teori ini muncul sebagai pengembangan dari teori hak kepemilikan (*property rights theory*) dan bertujuan untuk menjelaskan bahwa sekadar memiliki hak formal atas sumber daya belum tentu menjamin kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat nyata dari sumber daya tersebut.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), **akses** didefinisikan sebagai “*the ability to benefit from things*”, atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu—baik berupa sumber daya alam, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Teori ini menekankan bahwa akses tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan (*ownership*), tetapi juga oleh kemampuan untuk menggunakan, mengendalikan, dan mengelola sumber daya melalui berbagai mekanisme seperti hubungan sosial, modal ekonomi, kekuasaan politik, pengetahuan teknis, maupun keanggotaan dalam lembaga atau kelompok sosial tertentu.

Pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan, teori akses digunakan untuk memahami **mengapa sebagian masyarakat memiliki kemampuan lebih besar dalam memperoleh manfaat dari kebijakan atau program pembangunan dibandingkan dengan yang lain**, meskipun mereka berada dalam lingkungan yang sama. Akses terhadap sumber daya produksiseperti lahan, modal, teknologi, informasi, dan pasarmenjadi faktor penentu utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya petani.

Penelitian yang dilakukan oleh **Kuhfuss *et al.* (2021)** menunjukkan bahwa peningkatan akses petani terhadap inovasi pertanian, dukungan kelembagaan, dan jaringan sosial berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas serta ketahanan ekonomi rumah tangga petani di negara berkembang. Dengan demikian, teori akses memberikan kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana kebijakan publik, seperti program ketahanan pangan dari alokasi Dana Desa, berhasil memperluas kemampuan petani dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dan sosial yang tersedia.

Penelitian ini, alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah desa dalam membuka dan memperluas akses petani terhadap berbagai sumber daya penting. Melalui bantuan modal, pelatihan teknis, penyediaan sarana produksi pertanian, dan penguatan kelembagaan kelompok tani, program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani jagung untuk mengoptimalkan hasil produksi serta memperluas jaringan pemasaran hasil panen.

Teori akses juga membantu menjelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan program bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan dana atau sumber daya alam, tetapi juga oleh **asimetri kekuasaan, birokrasi, dan ketimpangan sosial** yang membatasi sebagian petani untuk berpartisipasi atau menikmati manfaat program. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menciptakan **kesetaraan akses** bagi seluruh lapisan petani di Desa Suka Pindah.

Dengan demikian, teori akses memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik di tingkat desa dapat berfungsi sebagai *enabler* dalam memperluas peluang ekonomi masyarakat petani. Teori ini sekaligus menjembatani hubungan antara **pelaksanaan program (variabel independen)** dan **kesejahteraan petani (variabel dependen)** melalui mekanisme peningkatan akses terhadap sumber daya, informasi, dan pasar.

2. Teori Pembangunan Pedesaan dan Kesejahteraan Petani

Pembangunan pedesaan (*rural development*) menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan memerlukan kombinasi antara produktivitas pertanian, akses ke pasar, modal, teknologi, infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung. Sebagai contoh, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur pertanian sangat menentukan pengurangan kemiskinan pedesaan melalui peningkatan kinerja usaha pertanian.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu konsep utama dalam kajian ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi lokal. Menurut **Todaro dan Smith (2020)**, pembangunan pedesaan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan antara desa dan kota.

Teori pembangunan pedesaan menempatkan sektor pertanian sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Ellis dan Biggs (2021) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dicirikan oleh peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi ekonomi lokal, serta keterlibatan aktif lembaga desa dalam mengelola sumber daya dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, alokasi Dana Desa menjadi instrumen penting karena memberikan ruang fiskal bagi pemerintah desa untuk membiayai program-program yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, **Chambers dan Conway (1992)** memperkenalkan konsep *sustainable rural livelihoods* yang menekankan pada kemampuan masyarakat pedesaan untuk mempertahankan dan meningkatkan mata pencaharian mereka tanpa merusak sumber daya alam. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan pedesaan modern yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ketahanan sosial dan lingkungan.

Penelitian ini, teori pembangunan pedesaan dapat dijelaskan melalui empat komponen utama berikut:

1. **Produktivitas dan Efisiensi Pertanian**

Produktivitas pertanian menunjukkan kemampuan petani dalam menghasilkan output (hasil panen) dari input yang digunakan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menjadi kunci dalam mencapai kesejahteraan petani. Menurut **Rejkiningsih (2025)**, produktivitas yang tinggi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Dana Desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan berperan dalam menyediakan sarana produksi, teknologi tepat guna, dan pelatihan yang dapat meningkatkan produktivitas jagung.

2. **Akses Pasar dan Infrastruktur**

Akses terhadap pasar menentukan sejauh mana petani dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang menguntungkan. Infrastruktur seperti jalan, irigasi, gudang, dan transportasi menjadi faktor pendukung utama. **Wang (2024)** menegaskan bahwa penguatan infrastruktur pedesaan dapat mengurangi biaya distribusi, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok hasil pertanian. Dengan demikian, program ketahanan pangan berbasis Dana Desa juga berfungsi sebagai sarana memperkuat konektivitas ekonomi desa dengan pasar.

3. **Institusi dan Kelembagaan Desa**

Kelembagaan desa berperan penting dalam mengelola dan mengawasi program pembangunan. **Mujahid dan Rahayu (2023)** menjelaskan bahwa kelembagaan desa yang kuat mampu memastikan transparansi penggunaan Dana Desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong keberlanjutan program ekonomi. Lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, dan lembaga keuangan mikro desa berperan penting dalam memperluas manfaat program ketahanan pangan.

4. **Mekanisme Distribusi Manfaat dan Kesejahteraan Petani**

Kesejahteraan petani tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan, termasuk akses terhadap program bantuan, sarana produksi, dan peluang ekonomi. Menurut **Jati et al. (2024)**, kesejahteraan petani akan meningkat apabila distribusi manfaat program dilakukan secara inklusif, transparan, dan memperhatikan kelompok rentan seperti petani kecil dan buruh tani. Dalam hal ini, teori pembangunan pedesaan menjelaskan bagaimana kebijakan publik seperti alokasi Dana Desa dapat berfungsi sebagai mekanisme pemerataan manfaat di tingkat lokal.

Berdasarkan keempat komponen di atas, teori pembangunan pedesaan membantu menjelaskan hubungan antara **pelaksanaan program ketahanan pangan (sebagai variabel independen)** dengan kesejahteraan **petani jagung (sebagai variabel dependen)**. Peningkatan produktivitas, akses pasar, kelembagaan yang kuat, dan distribusi manfaat yang adil menjadi jalur (pathway)

utama yang menghubungkan kebijakan Dana Desa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian.

3. Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Salah satu aspek penting dalam evaluasi program adalah sejauh mana suatu kebijakan atau program dilaksanakan secara efektif, sesuai desain, dan sampai ke sasaran yang tepat. Studi mengenai “*analysis of policy implementation of the food program in rural areas*” menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pangan di wilayah pedesaan memerlukan perhatian pada proses, hambatan, dan efektivitas program.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah suatu program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan tindakan individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada desain atau perumusan kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Seiring perkembangan teori kebijakan publik, muncul berbagai model implementasi yang menyoroti kompleksitas hubungan antara kebijakan, birokrasi, dan masyarakat. Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kejelasan tujuan kebijakan, (2) kecukupan sumber daya dan kemampuan pelaksana, serta (3) kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung. Teori ini

menegaskan bahwa implementasi merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor kebijakan, lembaga pelaksana, serta kondisi lingkungan.

Kebijakan pembangunan desa di Indonesia, implementasi kebijakan Dana Desa menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik yang baik harus memenuhi empat prinsip utama, yaitu: (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) partisipasi masyarakat, dan (4) efektivitas penggunaan sumber daya.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, terdapat tiga komponen utama yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini:

1. Pelaksanaan (Implementation)

Komponen ini mencakup keseluruhan proses penerapan kebijakan dari tahap perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan di tingkat desa. Dalam konteks alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, pelaksanaan mencakup penyusunan rencana kegiatan, distribusi anggaran, pelibatan masyarakat, serta koordinasi antarinstansi seperti perangkat desa, kelompok tani, dan pendamping desa. Menurut Pressmandan Wildavsky (1984), efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antaraktor serta kejelasan mekanisme kerja di lapangan.

2. Hambatan dan Faktor Penunjang (*Enablers/Barriers*)

Implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan sasaran program, birokrasi yang kompleks, maupun resistensi sosial. Sebaliknya, faktor penunjang seperti dukungan

pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan desa dapat memperlancar pelaksanaan program. Matland (1995) dalam model *ambiguity-conflict model* menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat konflik dan ambiguitas yang ada di lapangan. Dalam kasus penelitian ini, hambatan dapat muncul ketika distribusi bantuan tidak tepat sasaran atau ketika mekanisme pelaporan belum berjalan transparan.

3. Dampak (*Outcome*) terhadap Target Penerima

Tahap akhir implementasi kebijakan adalah penilaian terhadap hasil dan dampak yang dicapai. Menurut Dunn (2021), *outcome* adalah hasil nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat dari pelaksanaan program. Evaluasi *outcome* tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan program secara administratif, tetapi juga dampaknya terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, *outcome* dapat dilihat dari sejauh mana program ketahanan pangan yang dibiayai dari Dana Desa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani jagung baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, maupun ketahanan pangan rumah tangga.

4. Hubungan Antar Teori

Hubungan antar teori dalam penelitian ini dibangun untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana program ketahanan pangan yang didanai melalui alokasi 20% Dana Desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani jagung. Setiap teori memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dalam menjelaskan mekanisme hubungan antara kebijakan, akses, konteks pembangunan pedesaan, serta implementasi program di tingkat lokal.

Pertama, Teori Ketahanan Pangan berfungsi sebagai dasar normatif dan konseptual yang menjelaskan mengapa program ketahanan pangan perlu dilaksanakan. Teori ini menekankan bahwa setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga petani, berhak atas ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang memadai. Program ketahanan pangan menjadi penting karena memastikan petani tidak hanya berperan sebagai produsen pangan, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi dan gizi yang cukup. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan mengapa kebijakan alokasi 20% Dana Desa diarahkan pada kegiatan yang memperkuat sistem pangan lokal, terutama bagi petani jagung sebagai komoditas utama di desa penelitian.

Kedua, Teori Akses (*Theory of Access*) memperluas pemahaman dari sekadar kepemilikan sumber daya menjadi kemampuan nyata untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori akses menjelaskan bagaimana intervensi kebijakan berupa bantuan dana, teknologi, dan pelatihan yang dibiayai dari Dana Desa dapat membuka jalan bagi petani jagung untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pasar. Akses terhadap modal, sarana pertanian, dan teknologi yang lebih baik memungkinkan petani meningkatkan pendapatan serta memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga mereka. Oleh karena itu, teori ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan kebijakan ketahanan pangan dengan kesejahteraan petani.

Ketiga, Teori Pembangunan Pedesaan memberikan konteks struktural di mana kedua teori sebelumnya beroperasi. Teori ini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial-ekonomi

pedesaan yang mencakup faktor produksi, infrastruktur, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kesiapan institusi desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan lokal. Dengan demikian, teori pembangunan pedesaan menempatkan implementasi program dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan yang melibatkan sinergi antara kebijakan publik dan dinamika sosial masyarakat desa.

Keempat, Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*) menyoroti aspek proses dan dinamika pelaksanaan program di lapangan. Teori ini penting untuk memahami bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan atau besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi. Faktor-faktor seperti koordinasi antaraktor, keterlibatan masyarakat, kapasitas aparat desa, serta hambatan administratif menjadi variabel yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan melengkapi kerangka teoritis dengan memberikan perspektif evaluatif terhadap sejauh mana program ketahanan pangan benar-benar berdampak sesuai tujuan yang ditetapkan.

Keempat teori tersebut saling berhubungan secara kausal dan membentuk rangkaian logis (*causal chain*) yang menjelaskan hubungan antara kebijakan Dana Desa dan kesejahteraan petani jagung. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Ketahanan Pangan (Teori Ketahanan Pangan) memberikan dasar rasional dan tujuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi rumah tangga petani.
2. Akses terhadap sumber daya (Teori Akses) menjadi mekanisme yang menghubungkan kebijakan dengan dampak nyata di lapangan melalui pemberian modal, teknologi, dan pelatihan bagi petani jagung.
3. Konteks pembangunan pedesaan (Teori Pembangunan Pedesaan) menyediakan lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
4. Proses implementasi (Teori Implementasi Kebijakan) menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, dievaluasi dengan baik, dan memberikan outcome yang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan petani jagung.

Hubungan ini menunjukkan bahwa teori-teori tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam menjelaskan keterkaitan antara kebijakan publik dan perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Program ketahanan pangan yang efektif (berdasarkan teori implementasi kebijakan) akan memperkuat akses petani terhadap sumber daya (teori akses), berjalan dalam konteks kelembagaan desa yang mendukung (teori pembangunan pedesaan), dan pada akhirnya mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga serta kesejahteraan petani (teori ketahanan pangan).

Dengan kerangka integratif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana intervensi kebijakan di tingkat

desa melalui mekanisme alokasi Dana Desa dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Landasan Hukum dan Kebijakan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk ketahanan pangan merupakan respon strategis pemerintah dalam menghadapi krisis pangan global dan memperkuat ekonomi dari level akar rumput. Landasan utama kebijakan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembangunan sektor pertanian.

Sejak tahun 2022, Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) menetapkan kebijakan khusus mengenai ketahanan pangan. Menurut Savitri (2022), mandat alokasi minimal 20% dari Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal. Kebijakan ini secara teknis diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 (atau regulasi tahun terbaru yang berlaku), penggunaan dana tersebut diarahkan pada dua aspek utama:

1. Penguatan Produksi: Meliputi pengadaan bibit/benih, pupuk, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani atau irigasi desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Meliputi pelatihan teknik budidaya dan pengembangan pascapanen bagi kelompok tani.

Implementasi Dana Desa di sektor pertanian tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan cuma-cuma, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi. Aziz (2016) menyatakan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa sangat bergantung pada integrasi antara perencanaan desa dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Dalam konteks tanaman pangan seperti jagung, petunjuk teknis pelaksanaan biasanya menekankan pada pemanfaatan lahan terlantar dan optimalisasi peran Kelompok Tani (Poktan) sebagai unit pelaksana di tingkat lapangan.

6. Usahatani Jagung dan Struktur Biaya Produksi

Usahatani jagung merupakan suatu bentuk kegiatan yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal untuk memperoleh keuntungan di bidang pertanian. Keberhasilan usahatani ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik budidaya dan efisiensi pengelolaan variabel biaya.

Jagung (*Zea mays L.*) merupakan komoditas strategis yang memiliki adaptasi luas terhadap lingkungan. Menurut Subekti et al. (2012), pertumbuhan jagung yang optimal memerlukan persyaratan lingkungan yang spesifik, termasuk intensitas cahaya matahari yang tinggi, ketersediaan air yang cukup pada fase generatif, serta kesuburan tanah yang baik. Budidaya jagung di tingkat petani umumnya melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengendalian opt (organisme pengganggu tanaman), hingga panen dan pascapanen.

Dalam analisis ekonomi agribisnis, biaya produksi dikategorikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Soekartawi (2016) menjelaskan bahwa pendapatan

petani sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya variabel. Berikut adalah variabel biaya utama dalam usahatani jagung:

1. Benih: Benih merupakan faktor produksi utama yang menentukan potensi hasil. Penggunaan benih varietas unggul hibrida seringkali menjadi pilihan dalam program Dana Desa karena daya hasilnya yang tinggi, meskipun memerlukan biaya pengadaan yang lebih besar dibandingkan benih lokal.
2. Pupuk: Tanaman jagung termasuk tanaman yang rakus hara, terutama Unsur Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Menurut Suratiyah (2015), ketepatan dosis dan waktu pemupukan merupakan variabel biaya terbesar kedua setelah tenaga kerja yang sangat memengaruhi efisiensi teknis usahatani.
3. Tenaga Kerja: Komponen ini meliputi tenaga kerja manusia (LOK) untuk kegiatan pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, hingga panen. Tenaga kerja dapat berasal dari dalam keluarga maupun luar keluarga (upah), yang secara signifikan akan memengaruhi total biaya produksi (*Total Cost*).

7. Konsep Pendapatan Usahatani

Pendapatan merupakan indikator utama keberhasilan suatu unit usaha, termasuk usahatani jagung di Desa Suka Pindah. Dalam analisis agribisnis, pendapatan tidak hanya dilihat dari total uang yang diterima, tetapi harus memperhitungkan seluruh pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan selama proses produksi.

1. Penerimaan Total (*Total Revenue*)

Penerimaan total adalah nilai produk yang dihasilkan dari usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang dikonsumsi sendiri, yang dinilai berdasarkan harga pasar. Menurut Soekartawi (2016), besar kecilnya penerimaan sangat bergantung pada volume produksi yang dihasilkan (Q) dan harga jual yang berlaku di pasar (P). Secara matematis, penerimaan total dirumuskan sebagai:

$$TR=P \times Q$$

2. Biaya Total (*Total Cost*)

Biaya produksi dalam usahatani adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik berupa uang tunai maupun non-tunai (seperti tenaga kerja dalam keluarga). Suratiyah (2015) menyatakan bahwa biaya total terdiri dari dua komponen utama:

1. Biaya Tetap (*Fixed Cost/FC*): Biaya yang besarnya tidak tergantung pada volume produksi, contohnya pajak lahan dan penyusutan alat pertanian.
2. Biaya Variabel (*Variable Cost/VC*): Biaya yang besarnya berubah seiring perubahan volume produksi, seperti biaya benih, pupuk, dan upah tenaga kerja.

$$TC=FC+VC$$

3. Pendapatan Bersih (*Net Income*)

Pendapatan bersih atau keuntungan usahatani adalah selisih antara penerimaan total (TR) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan (TC). Menurut Hernanto (1996), pendapatan inilah yang mencerminkan imbalan yang diterima

petani atas kemampuan manajerial dan penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, pendapatan bersih menjadi tolok ukur untuk melihat efektivitas alokasi Dana Desa 20% dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jagung.

$$Pd=TR-TC$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian *Kariyasa (2014)* berjudul “Economic Impact Assessment of Integrated Crop Management Farmer Field School Program on Corn Production in Indonesia” menilai dampak program *Integrated Crop Management–Farmer Field School (ICM-FFS)* terhadap produktivitas dan pendapatan petani jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ICM-FFS meningkatkan produktivitas jagung sebesar 30,95%, terutama karena peningkatan efisiensi penggunaan input (27,94%) dan inovasi teknologi (3,01%). Selain itu, pendapatan petani naik 71,03%, dan kesejahteraan sosial meningkat 94,69% dibandingkan petani nonpeserta. Analisis *Policy Analysis Matrix* menunjukkan nilai $DRCR = 0,676$ dan $PCR = 0,463$, menandakan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi jagung domestik yang lebih efisien dibanding impor.

Penelitian yang berjudul “*Do Village Allocation Funds Contribute towards Alleviating Hunger among the Local Community (SDG#2)? An Insight from Indonesia*” oleh Manurung et al. (2022) bertujuan untuk menganalisis hubungan antara alokasi Dana Desa dan penurunan tingkat kelaparan masyarakat di Indonesia, sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* nomor 2 (*Zero Hunger*). Penelitian ini menggunakan data nasional periode 2018–2020 dengan metode

kuantitatif dan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan kelaparan di wilayah pedesaan. Program ini terbukti efektif dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian berjudul “*Financial Support Program for Small Farmers, and Its Impact on Local Food Security: Evidence from Indonesia*” oleh Purnawan et al (2021) bertujuan untuk menilai dampak program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani kecil di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan, dengan studi kasus di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KMP memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan akses pangan petani kecil melalui kemudahan akses kredit mikro. Petani penerima manfaat mampu meningkatkan produksi, membeli kebutuhan pokok, dan memperluas konsumsi pangan rumah tangga. Namun, pengaruh terhadap pola konsumsi bersifat terbatas karena masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tabungan dibanding peningkatan kualitas gizi.

Indraningsih et al (2021) berjudul “*The Impact of the Use of Village Funds on Sustainable Agricultural Development*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Dana Desa terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas petani, serta kesejahteraan masyarakat desa. Hasil studi menunjukkan

bahwa: Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, saluran irigasi, dan gudang hasil pertanian membantu memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil panen. Perbaikan fasilitas pertanian mempercepat proses pengangkutan input dan output produksi, yang berdampak langsung pada efisiensi usaha tani dan daya saing petani di pedesaan. Namun, peneliti menegaskan bahwa alokasi Dana Desa tidak seharusnya hanya difokuskan pada infrastruktur fisik. Di masa depan, sebagian dana sebaiknya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai potensi desa.

Sitorus, R. S., Siregar, A. F., & Alqamari, M. (2025) – *The Effect of Food Security Programs Through Village Funds on the Income of Village Communities in Hampan Perak District*. Penelitian ini meneliti pengaruh program ketahanan pangan yang dibiayai oleh dana desa terhadap peningkatan pendapatan komunitas desa. Hasil menunjukkan bahwa program tersebut memiliki efek positif terhadap pendapatan petani, meskipun terdapat variabilitas antar kelompok dan ketergantungan pada pelaksanaan program yang tepat sasaran.

Yuliana. (2024) – *Village Funds Utilization Strategy to Improve Food Security in Kuwu Village, Dempet Sub-District, Demak Regency*. Penelitian kuantitatif dengan analisis SWOT di Desa Kuwu menemukan bahwa dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur sementara strategi untuk meningkatkan diversifikasi pangan dan produksi lokal masih lemah.

Rekomendasi termasuk intensifikasi/ diversifikasi produksi dan peningkatan SDM petani.

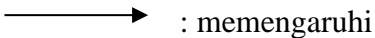
Hasan, T. S., Bakari, Y., & Hippy, M. Z. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Pertanian di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Dana Desa terhadap pembangunan pertanian di Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana penggunaan Dana Desa mendukung peningkatan infrastruktur pertanian, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, Nilai t-hitung sebesar 13,382 lebih besar dari t-tabel 2,048 dengan signifikansi $< 0,05$, yang berarti pemanfaatan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan pertanian di Desa Lobuto. Dana Desa berkontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta bantuan bibit unggul. Dampak positif dari alokasi dana ini terlihat pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, kemudahan distribusi hasil panen, dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani. Penulis menekankan bahwa untuk keberlanjutan pembangunan pertanian, pengelolaan Dana Desa harus diarahkan secara terencana dan partisipatif, agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat tani.

C. Model Pendekatan

Untuk memudahkan memahami alur penelitian, peneliti menyusun model pendekatan yang menunjukkan hubungan dari kebijakan, input, proses

pelaksanaan, sampai hasil dan dampaknya. Model pendekatan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.

Keterangan :
 : memengaruhi

Gambar 1. Model Pendekatan Penelitian.

D. Batasan Operasional

1. Penelitian ini difokuskan pada program ketahanan pangan yang didanai melalui alokasi 20% Dana Desa di Desa Suka Pindah, Kecamatan KPR, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 2024.
2. Pelaksanaan program ketahanan pangan adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ketahanan pangan yang didanai dari Dana Desa 20% di Desa Suka Pindah.
3. Subjek penelitian adalah petani jagung penerima manfaat program ketahanan pangan yang telah mengikuti program minimal satu tahun anggaran.

4. Pemanfaatan Dana Desa 20% untuk Ketahanan Pangan adalah penggunaan sebagian dana desa untuk mendanai program kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di sektor pertanian, khususnya jagung.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program, Menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dan petani jagung dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan lapangan, serta monitoring dan evaluasi program.
6. Efektivitas Realisasi Bantuan (Saprodi), Menggambarkan ketepatan penggunaan, waktu penyaluran, serta manfaat bantuan sarana produksi pertanian yang diterima petani.
7. Kesesuaian Kegiatan dengan Kebutuhan Petani, Menggambarkan relevansi program dan bantuan yang diberikan dengan kebutuhan, kondisi lahan, dan permasalahan utama yang dihadapi petani jagung.
8. Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan penilaian responden terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan Dana Desa 20%. Dalam penelitian ini digunakan skala 1–3, yaitu:
9. Skor 1 = Tidak Setuju
10. Skor 2 = Netral
11. Skor 3 = Setuju
12. Hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk persentase capaian dan dikategorikan kedalam kriteria tidak baik, cukup, atau baik.
13. Pendapatan usahatani jagung adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan petani dalam satu kali musim tanam jagung setelah menerima program ketahanan pangan Dana Desa 20%.

14. Total penerimaan (Total Revenue) adalah nilai yang diperoleh petani dari hasil penjualan jagung selama satu musim tanam, yang dihitung dari hasil produksi jagung dikalikan dengan harga jual di tingkat petani (Rp/musim tanam).
15. Total biaya (Total Cost) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan petani jagung selama satu musim tanam, yang terdiri dari:
16. Biaya Tetap meliputi penyusutan alat parang, cangkul, mesin potong rumput, hand sprayer, terpal, tengkuik.
17. Biaya Variabel meliputi Jumlah Penggunaan Bibit, Pupuk, Pestisida, dan Herbisida, Tenaga kerja.